



## **Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)**

### ***Women's Participation in Village Institutions (Study at Village Office of Perpenden Kecamatan Kutalimbaru)***

**Vernalia Calesna Br Barus<sup>1)\*</sup>, Beby Masitho Batu Bara<sup>2)</sup>, Nina Angelia<sup>3)</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Desa Perpenden merupakan salah satu desa di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang/sekelompok orang untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini, partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari peran, keterlibatan, serta keterwakilan perempuan dalam struktur fungsional di lembaga desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, faktor penghambat peran dan tingkat partisipasi perempuan di Kantor Desa Perpenden masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor budaya, faktor keluarga, faktor dari diri perempuan sendiri, faktor sosialisasi/pengarahannya, dan faktor peran lokal. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut maka dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden guna kemajuan kaum perempuan Desa Perpenden.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Perempuan, Kelembagaan desa.

#### **Abstract**

*Perpenden Village is one of the villages in Kutalimbaru District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. The problem in this study is to describe women's participation in village institutions at the Perpenden Village Office, Kutalimbaru District. Participation is the involvement of a person / group of people to take part and be responsible in the community environment. In this study, women's participation in village institutions at the Perpenden Village Office was still low. This can be seen from the role, involvement and representation of women in the functional structures of village institutions. This research conducted, that uses qualitative methods. For data collection, researchers conducted direct observation, interviews, and documentation. From the results of the research conducted, the inhibiting factors for the role and level of women's participation in the Perpenden Village Office are still low due to several factors including educational factors, cultural factors, family factors, factors from women themselves, socialization / direction factors, and local role factors. To catch up with this lag, efforts were made to increase women's participation in village institutions at the Perpenden Village Office for the advancement of women in Perpenden Village.*

**Keywords:** Participation, Women, Village Institutions.

**How to Cite:** Barus, V.C. Batu Bara, B.M. & Angelia, Nina. (2020). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2) 2020: 128-136,



## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara demokrasi dimana pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Semua proses pembuatan kebijakan politik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dalam Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (3) Setiap warga negara berhak dan wajib serta ikut dalam upaya pembelaan negara. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, dimana pemerintah memberikan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah. Makna 30% adalah bahwa pemerintah menghimbau perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Pada konteks pembahasan ini, bisa diartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam mensukseskan program-program pemerintahan, karena sudah diberlakukannya *gender equality* atau kesetaraan gender dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama tanpa ada diskriminasi dari aspek manapun, perempuan dan laki-laki dipandang sama dan diperlakukan setara tanpa melihat perbedaan hak. Namun kenyataannya, posisi dan peran perempuan dalam program pemerintahan masih termaginalkan.

Proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan *United Nations Populations Fund* jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan (<http://databoks.katadata.co.id>). Hal ini merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup besar apabila kaum perempuan memiliki kapasitas yang memadai dan ada peluang untuk berperan didalamnya khususnya dalam jabatan politik di Indonesia. Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur tata kelola desa secara leluasa sesuai kewenangan yang dimilikinya dan memberdayakan partisipasi Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan bagi desa untuk mengatur tata kelola desa secara leluasa sesuai kewenangan yang dimilikinya dan memberdayakan partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Partisipasi masyarakat mengandung makna pelibatan masyarakat desa baik laki-laki maupun perempuan untuk membangun desa. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum, dimana pemerintah memberikan 30% keterwakilan perempuan untuk setiap daerah. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan mutlak diperlukan untuk bersama-sama membangun desa dan menikmati hasil-hasil pembangunan desa secara adil. Namun fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, tingkat partisipasi perempuan masih rendah bahkan masih jauh dari kata maksimal walaupun sudah dibuat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dimana di Desa Perpanden tingkat partisipasi perempuannya masih sangat kurang dalam kelembagaan desa khususnya dalam lembaga BPD di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimaru Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan yang terjadi pada lembaga BPD di Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru adalah tidak adanya keterwakilan perempuan dalam struktur fungsional di BPD tersebut.

Menurut Keith Davis di dalam bukunya *"Human Relational Work"* mengatakan bahwa *"participation is defined as mental and emotional involment of a person in a group situation which ecourages him to contribute to group goals and share resposibility in them"*

partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung jawabkan keterlibatannya (Keith Davis, 2000). Tujuan partisipasi menurut Schiller dan Antlov (dalam Hetifah, 2003:152) yaitu sebagai berikut: Menciptakan visi bersama, Membangun rencana, Mengumpulkan gagasan, Menentukan prioritas (membuat pilihan), Menjaring aspirasi (masukan), Mengumpulkan informasi.

Menurut Keith Devis dalam Naning Margasari, partisipasi harus melibatkan mental dan emosional dalam situasi kelompok dan rasa Tanggungjawab terhadap kelompok. Dari pengertian tersebut, ini mengingatkan bahwa memang mental dan emosional perempuan dan laki-laki tidak sama. Perempuan cenderung lebih emosional dan memiliki mental yang lemah dari laki-laki Hal ini juga akan mempengaruhi kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan beberapa hambatan yang dirasakan perempuan dalam berpartisipasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dilihat dari segi pendidikan, segi kultur budaya, segi keluarga, dan segi diri perempuan sendiri sedangkan faktor eksternal dilihat dari segi sosialisasi atau pengarahan, segi pandangan tentang politik, dan segi peran local (Ramlan Surbakti, 2004).

Partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolakkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan dibidang politik mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuat kebijakan sampai pada menghambat atau menentang sebuah kebijakan (Skripsi Susi Susanti, 2015; Kurniaty E.Y., 2015; Barus, R.K.I., 2015; Susi S dan Adelita L., 2015).

Upaya memberdayakan perempuan perlu terus dilakukan agar mereka tidak terjebak sebagai objek melainkan dapat berperan sebagai subjek dan memberikan seluruh potensinya dalam proses pembangunan. Untuk itu keterlibatan perempuan dalam kelembagaan desa mutlak diperlukan agar dalam proses pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik ini akan memberikan peluang terhadap pemecahan masalah-masalah perempuan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan mereka. Dengan melibatkan perempuan dalam kelembagaan desa juga mempunyai arti memberi kesempatan kepada kaum perempuan dalam tanggungjawab sosialnya selain itu potensi yang dimiliki perempuan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi strategis dengan melibatkan perempuan dalam proses pembangunan melalui kelembagaan desa dari penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sehingga ada keseimbangan antara perempuan dengan laki-laki mengingat pada sekarang ini sudah diberlakukannya kesetaraan gender (Jurnal Endang Widayati, 2015).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga desa yakni: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga

Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Kerjasama antar Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **METODE PENELITIAN**

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Lokasi yang menjadi tempat penelitian peneliti berada di Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tentang "Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Deli Serdang)" dimulai sejak judul tugas akhir ini disetujui. Informan dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang akan memberikan informasi terhadap objek yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian guna memperoleh informasi yang jelas yang dibutuhkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data adalah sebagai berikut: Kepustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi data, teknik analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan dan 133,12 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki. Hal ini merupakan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup besar apabila kaum perempuan memiliki kapasitas yang memadai dan ada peluang untuk berperan didalamnya. Perempuan merupakan investasi, aset, dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan perempuan sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-anak bangsa dalam sebuah keluarga.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam lingkungan masyarakat. Partisipasi terbagi atas dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah warga negara mengajukan usul kebijakan, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah sedangkan partisipasi pasif adalah berupa kegiatan menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Partisipasi aktif yang dimaksud adalah masyarakat Desa Perpenden memiliki inisiatif sendiri untuk berperan serta dalam pembentukan peraturan daerah di Desa Perpenden. Partisipasi aktif dapat dilakukan dengan cara

antara lain mengikuti rapat umum, musyawarah, serta terlibat di setiap kegiatan yang ada di Desa Perpenden. Sedangkan partisipasi pasif yang dimaksud adalah masyarakat

Desa Perpenden hanya menerima dan melaksanakan setiap keputusan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa tanpa ikut terlibat dalam pembuatan peraturan tersebut.

Tingkat partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden sendiri secara umum tergolong masih sangat rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi perempuan jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki. Dimana sebagian besar perempuan di Desa Perpenden menganggap bahwa ikut berpartisipasi dalam kelembagaan desa hanya membuang waktu saja dan perempuan memiliki keterbatasan kesempatan untuk ikut terlibat dalam forum-forum publik dilingkungannya. Sehingga mereka hanya mewakili suaranya kepada laki-laki. Bahkan ketika pemerintah desa melakukan rapat-rapat atau musyawarah desa dengan mengundang masyarakat desa baik masyarakat perempuan ataupun masyarakat laki-laki, sangat sedikit masyarakat perempuan yang hadir dalam rapat atau musyawarah tersebut.

Peran dan partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa khususnya di Kantor Desa Perpenden sangat dibutuhkan Karena keterlibatan dan keterwakilan perempuan di dalam kegiatan kelembagaan desa masih sangat kurang, bahkan di lembaga BPD di Desa Perpenden tidak ada perempuan. yang ikut terlibat dalam struktur fungsional BPD padahal perwakilan perempuan sangat dibutuhkan untuk permasalahan perempuan karena hanya perempuanlah yang mampu menyuarakannya dan mampu memberikan

Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. Jadi, dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Perpenden sudah memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan agar perempuan ikut berperan dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan kelembagaan desa. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat perempuan di Desa Perpenden yang masih kurang, sehingga partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden masih rendah dan alasan lainnya yaitu gaji dalam kelembagaan desa terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sesuai dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan maka diperoleh faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi perempuan kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal yaitu faktor segi pendidikan, segi kultur budaya, segi keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar yang melingkupi sosialisasi atau pengarahan dan segi peran lokal. Dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Segi pendidikan, Adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdampak pada perbedaan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga perempuan tertinggal dalam memperoleh informasi dan keterbatasan komunikasi, sehingga perempuan terhambat dalam membangun jaringan di wilayah publik. Informasi tentang kelembagaan desa selalu diterima melalui perspektif laki-laki, sehingga perempuan tereliminasi karena beranggapan bahwa kelembagaan desa

menjadi fenomena di luar dirinya. Hal ini dapat menjadi penghambatan yang besar bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, tingkat pendidikan di Desa Perpenden masih kurang baik, khususnya tingkat pendidikan pada perempuan. Pendidikan yang tinggi masih diutamakan pada laki-laki dibandingkan perempuan karena sebagian orangtua beranggapan bahwa tugas perempuan setelah menikah adalah mengurus rumah tangga dan juga sebagian orangtua belum memahami pentingnya sebuah pendidikan formal bagi anak demi kemajuan dan masa depan untuk anak.

Akibat tingkat pendidikan yang kurang baik terhadap perempuan di Desa Perpenden tersebut juga mempengaruhi pola pikir pada diri perempuan itu sendiri. Karena hambatan berpartisipasi secara politis berasal dari perempuan itu sendiri. Pencitraan perempuan sebagai makhluk lemah, tidak mandiri, kurang tanggung jawab yang sudah meresap di alam bawah sadar, dirasakan oleh perempuan sebagai fitrah, bawaan, dan kodrati. Inferioritas (rendah diri) akibat konstruk masyarakat juga menjadi hambatan perempuan dalam proses aktualisasi potensi dirinya. Perempuan kurang mempunyai mengukur potensi diri menyebabkan perempuan seolah kehilangan jati dirinya. Sebagai akibatnya adalah pola pikir perempuan menjadi sangat akrab dengan kepasrahan, sengaja atau tidak akan dimanfaatkan oleh kekuatan superioritas laki-laki. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa segi diri perempuan sendiri bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sekaligus menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru disebabkan karena banyak perempuan yang kurang percaya diri akan kemampuan yang mereka miliki sendiri serta keterbatasan yang mereka miliki baik keterbatasan waktu, tenaga, dan finansial begitu juga pola pikir yang menganggap bahwa gaji di kelembagaan desa sedikit sehingga tidak tertarik untuk ikut terlibat karena takut tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Segi kultur budaya bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara perempuan dan laki-laki dalam memimpin, bahkan perempuan selalu menilai bahwa kebudayaan suku/etnis mempengaruhi kepartisipasiannya dalam kelembagaan desa bahkan segi kultur budaya pun perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki baik itu ayah ataupun suami. Perempuan lebih ditekankan kepada budaya suku Batak yang melekat di Desa Perpenden yaitu budaya patriarki (sistem sosial dimana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak istimewa sosial, kontrol property, dan sebagainya) yang mengatakan bahwa perempuan adalah pelayan bagi laki-laki serta perempuan tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik. Dari penelitian yang dilakukan bahwa kultur budaya dapat mempengaruhi dan menghambat perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpenden, dimana masih adanya budaya patriarki yaitu derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan. Namun budaya tersebut sebenarnya sudah mulai hilang dalam masyarakat, namun kesadaran perempuan di Desa Perpenden akan pentingnya partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa yang masih rendah.

Segi Keluarga, keluarga merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam kelembagaan desa. Hal ini disebabkan masih berkaitan dengan adanya faktor budaya yang menyatakan perempuan di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan pendapat dari laki-laki disekitarnya baik itu suami atau ayahnya karena perempuan dianggap sebagai pelayan bagi laki-laki serta tidak berhak mengambil keputusan termasuk dalam pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga di dalam perempuan untuk ikut berpartisipasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa segi keluarga dapat menjadi penghambat dan mempengaruhi seorang perempuan untuk berpartisipasi khususnya dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden Kecamatan Kutalimbaru karena untuk maju perempuan membutuhkan dukungan dari pihak keluarga.

Sosialisasi atau Pengarahan khusus untuk Perempuan Sosialisasi atau pengarahantentang politik atau kelembagaan desa, kaum perempuan terkadang menganggap bahwa sosialisasi tersebut dianggap tidak perlu untuk dihadiri, karena perempuan lebih mementingkan kepentingan yang bersifat pribadi. Perbedaan sosialisasi antara kaum perempuan dan laki-laki adalah di dalam pemberian pengarah politik selalu mengutamakan laki-laki di dalam pemberian pengarah politik. Perempuan selalu dianggap tidak perlu mengikuti sosialisasi tersebut karena dianggap sebagai *second class* bahkan karena rendahnya tingkatan pendidikan kaum perempuan maka di dalam sosialisasi pun kaum perempuan diterbelakangkan. Dari penelitian yang dilakukan bahwa faktor sosialisasi atau pengarah dapat mempengaruhi perempuan untuk berpartisipasi. Kurangnya sosialisasi atau pengarah dari pihak yang berwenang akan membuat perempuan sulit menerima informasi yang ada apalagi ikut untuk terlibat dalam kegiatan dalam kelembagaan desa. Maka dari itu perlunya pengarah atau sosialisasi khusus untuk perempuan supaya perempuan lebih intim dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga membuka wawasan perempuan tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam lembaga desa dan mengubah pola pikir perempuan tentang pandangan politik yang selama ini disalah artikan serta menganggap bahwa perempuan tidak begitu penting untuk ikut dalam dunia perpolitikan.

Pandangan politik yang selama ini disalah artikan adalah bahwa kaum perempuan tidak dapat berpartisipasi politik karena perempuan memandang politik itu tidak terlalu penting bagi kaum perempuan. Perempuan lebih mementingkan urusan rumah tangganya daripada politik. Sebagian perempuan beranggapan bahwa memasuki wilayah politik adalah memasuki wilayah yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Kurangnya kaum perempuan yang memiliki naluri juang dalam berpolitik untuk membela kaum perempuan yang lemah dan tertindas yang dikenal dengan politik *androsentris*, politik *androsentris* dengan ciri khasnya adalah memarginalisasi perempuan, semestinya menjadi agenda untuk dihapuskan dan mempopulerkan politik *androgini* yaitu pembagian peran yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Segi peran lokal, Peran lokal adalah dimana peran lingkungan seperti tokoh masyarakat dalam partisipasi kelembagaan desa tidak mendukung kaum perempuan berpartisipasi dikarenakan faktor lingkungan yang memandang kaum perempuan hanya

sebagai pelayan bagi suami serta keterbelakangan pendidikan di kalangan lingkungan sekitar bahkan tokoh masyarakat jarang memberikan saran sebagai dukungan agar perempuan bisa dan yakin jika perempuan itu sendiri mampu berpartisipasi di kelembagaan desa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa faktor segi peran lokal dapat menghambat atau mempengaruhi perempuan untuk berpartisipasi dalam kelembagaan desa pada Kantor Desa Perpanden. Hal ini dikarenakan lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar lah yang mengetahui bagaimaa sifat, karakter dan kapasitas perempuan untuk maju dan ikut dalam berpartisipasi. Dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar maka secara tidak langsung akan membantu mensosialisasikan pentingnya peran dan partisipasi perempuan untuk ikut terlibat dalam kelembagaan desa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis/penelitian serta data- data observasi maupun wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pemerintah Desa Perpanden sudah memberikan peluang dan kesempatan kepada perempuan agar perempuan ikut berperan dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan kelembagaan desa. Namun kenyataannya, kesadaran masyarakat perempuan di Desa Perpanden yang masih kurang, sehingga partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa di Kantor Desa Perpanden masih rendah dan belum berjalan dengan optimal.

Faktor penghambat partisipasi perempuan dalam kelembagaan desa pada kantor Desa Perpanden disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor penghambat internal yaitu faktor segi pendidikan, segi kultur budaya, dan segi keluarga, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar yang melingkupi sosialisasi atau pengarahan khusus untuk perempuan dan segi peran lokal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barus, R.K.L., (2015), *Pemberdayaan Perempuan melalui Media Sosial*, *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Comunication Study*, 1 (2): 118-128
- Daulay, R. S. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*. Universitas Medan Area.
- Daulay, R.S. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Botung Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas*. Universitas Medan Area.
- Emzir. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniaty E.Y., (2015). *Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India*, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 3 (2): 187-197
- Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2015). *Metodologi Penelitian : Memberi Bekal Teoretis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan Penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal DIMENSIA*, Volume 4, Nomor 2, 2010.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* Bandung: Alfabeta.
- Supartinah. (2010). *Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Studi Kasus pada Desa Pakelen Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara*. *Jurnal DIMENSIA*, Volume 4, Nomor 2, 2010

**Vernalia Calesna Br Barus, Beby Masitho Batu Bara & Nina Angelia, Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalim baru)**

- Supartinah. (2010). Partisipasi Perempuan dalam Struktur Organisasi Desa (Studi Kasus pada Desa Surbakti, R. (2004). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Susanti, S. (2015). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2014 Kota Medan). Universitas Medan Area.
- Susanti, S. (2015). Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada DPD Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2014 Kota Medan). Universitas Medan Area.
- Susi S dan Adelita L., (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 3 (1): 1-3.
- Suyanto, & Bagong. (2005). Metode Penelitian Sosial : berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tiffani, W. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Universitas Medan Area.
- Tiffani, W. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Universitas Medan Area.
- Tohirin. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widayati, E. (2015). Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan Desa (Studi Kasus pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto). Jurnal Universitas PGRI.
- Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Jakarta: Rajawali Pers.